



# BATUTAH

Jurnal Sejarah Peradaban Islam

## SEJARAH KESULTANAN CIREBON DAN PROBLEMATIKANYA TAHUN 1677-1752

Bahru Rozi

Email: [rozibahru45@gmail.com](mailto:rozibahru45@gmail.com)

Ahmad Misbah

Email: [AbFarsy@gmail.com](mailto:AbFarsy@gmail.com)

Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Pasuruan

### ABSTRAK

Pecahnya Kesultanan Cirebon sangatlah berdampak pada kehidupan masyarakat di Cirebon, yaitu menyebabkan adanya perubahan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui gambaran menyeluruh tentang masa awal Kesultanan Cirebon (2) mengetahui faktor pecahnya Kesultanan Cirebon (3) mengetahui dampak pecahnya Kesultanan Cirebon terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya di Cirebon.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut Kuntowidjyo, Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Cirebon menjadi sebuah kesultanan yang berdaulat penuh bermula dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati memberhentikan pemberian upeti kepada Kerajaan Pajajaran. Pasca Pemerintahan Panembahan Ratu II Kesultanan Cirebon pada tahun 1677 pecah menjadi Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman. (2) Pecahnya Kesultanan Cirebon diakibatkan adanya campur tangan Kesultanan Banten dan Mataram. Dua kekuatan ini ingin menguasai wilayah Cirebon dan Pelabuhan Cirebon yang letaknya strategis dalam jalur perdagangan internasional. (3) Pecahnya Kesultanan Cirebon berdampak pada perubahan politik dan ekonomi masyarakat Cirebon yaitu hilangnya kekuasaan politik sultan dalam memimpin Cirebon dan monopoli perdagangan oleh VOC baik ekspor maupun impor barang dagangan, Perubahan juga terjadi dalam bidang sosial, yaitu maraknya perbudakan dan penjualan diri di Cirebon akibat kesengsaraan dan kemiskinan. Dalam bidang budaya adanya perubahan dalam sistem mata pencaharian masyarakat, sistem peralatan hidup dan teknologi, organisasi politik, agama dan kesenian Cirebon.

**Keyword:** *Sejarah, Kesultanan Cirebon, Problematika*

*Batutah: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*

*Volume 1, Nomor 1, 2022*

## PENDAHULUAN

Cirebon merupakan bagian dari wilayah administratif Jawa Barat. Secara teritorial, geografis Cirebon terletak di bibir pantai utara antara Jawa Barat dan Jawa Tengah.<sup>1</sup> Berita tentang nama Cirebon disebutkan dalam perjalanan Tome Pires, seorang berkebangsaan Portugis yang pernah mengadakan pelayaran disepanjang pantai utara Jawa pada tahun 1531. Tome Pires menuliskan nama Cirebon dengan sebutan Chorobon, sedangkan sebutan oleh orang Belanda adalah Charabaon.<sup>2</sup> Dalam kitab Purwaka Tjaruban Nagari, Cirebon berasal dari kata Sarumban yang artinya pusat tempat percampuran penduduk dan berubah menjadi Caruban yang akhirnya menjadi Carbon. Sebutan Carbon inilah yang akhirnya dikemudian hari berubah menjadi Cirebon.<sup>3</sup> Cirebon berasal dari kata ci yang dalam bahasa sunda adalah singkatan dari cai berarti air dan rebon yang artinya udang kecil. Ci dalam bahasa Cirebon lebih mengacu ke air sisa pembuatan terasi, sehingga Cirebon adalah air sisa pembuatan terasi dari rebon atau udang kecil.<sup>4</sup>

Cirebon pada awalnya merupakan bagian dari kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Pada saat Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati mendapatkan kedudukan selaku penguasa Cirebon untuk menggantikan Pangeran Cakrabuana, Cirebon melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Dengan adanya pemerintahan Sunan Gunung Jati, menandakan surutnya Kerajaan Hindu Pajajaran di Jawa Barat. Hal ini dikarenakan masyarakat Pajajaran banyak yang meninggalkan agama Hindu dan memeluk agama Islam.<sup>5</sup> Pada masa pemerintahan para pengganti Sunan Gunung Jati, mulai terlihat adanya penurunan kekuatan Cirebon sebagai kerajaan Islam yang besar dan berpengaruh di Jawa Barat.

Atas dasar uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui asal muasal sejarah kesultanan Cirebon, sebab terpecahnya serta dampaknya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Cirebon.

---

<sup>1</sup> Sanggupri Bochari dan Wiwi Kuswiyah, *Sejarah Kerajaan Tradisional Cirebon*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001), hlm. 5.

<sup>2</sup> Sobana Hardjasaputra dkk, *Cirebon dalam Lima Zaman (Abad ke-15 hingga Pertengahan Abad ke-20)*. (Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2011), hlm. 19.

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Sobana Hardjasaputra dkk, *op.cit.*, hlm. 20

<sup>5</sup> R.A. Kern dan Hoesein Djajadiningrat, *Masa Awal Kerajaan Cirebon*. (Jakarta: Bhratara, 1974), hlm. 14

## PEMBAHASAN

### A. Sejarah Masa Awal Kesultanan Cirebon

Cirebon pada awalnya merupakan pemukiman kecil dibawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang sebagai kuwu.<sup>6</sup> Cirebon membangun Keraton Pakungwati sekitar tahun 1452. Pembangunan keraton ini mengandung arti bahwa di Cirebon berlangsung pemerintahan lokal yang bercorak Islam.<sup>7</sup> Hal ini dikarenakan Pangeran Cakrabuana telah memeluk agama Islam sehingga pangeran ingin lepas dari kekuasaan Kerajaan Hindu Pajajaran.

Pangeran Cakrabuana juga merupakan putra dari Raja Pajajaran yaitu Prabu Siliwangi sehingga dia tetap menghormati ayahnya. Hal inilah yang membuat Pangeran Cakrabuana tetap bertahan untuk setia menjadi bagian dari Kerajaan Pajajaran. Pangeran Cakrabuana mempunyai putri bernama Nyi Mas Pakungwati dari pernikahannya dengan Nyai Mas Endang Gelis. Pada tahun 1479 Nyi Mas Pakungwati menikah dengan Sunan Gunung Jati yang merupakan saudaranya sendiri. Sunan Gunung Jati adalah keponakan dari Pangeran Cakrabuana atau anak dari adiknya yaitu Ratu Mas Rara Santang. Nyi Mas Pakungwati merupakan istri ketiga karena sebelumnya Sunan Gunung Jati telah menikah dengan Nyai Babadan dan Nyai Lara Bagdad alias Syarifah Bagdad.<sup>8</sup>

Pangeran Cakrabuana menyerahkan kedudukannya sebagai kuwu Cirebon kepada Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 dan Sunan Gunung Jati mendapatkan gelar Susuhunan Jati atau Susuhunan Cirebon. Langkah pertama yang diambil oleh Sunan Gunung Jati setelah menjadi penguasa Cirebon adalah melepaskan diri dari Kerajaan Pajajaran dengan menghentikan pemberian upeti atau pajak berupa garam dan terasi kepada Kerajaan Pajajaran. Peristiwa ini terjadi sekitar 12 Safar 887 Hijriah atau 2 April 1482<sup>9</sup> Sejak berhentinya pemberian upeti inilah

---

<sup>6</sup> Kuwu adalah kepala desa. Hingga saat ini pemakaian gelar kuwu masih digunakan untuk gelar Kepala Desa di daerah Cirebon

<sup>7</sup> Sobana Hardjasaputra dkk, *Cirebon dalam Lima Zaman (Abad ke-15 Hingga Pertengahan Abad ke-20)*. (Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2011), hlm. 51

<sup>8</sup> P.S. Sulendraningrat, *Sejarah Cirebon*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm. 74.

<sup>9</sup> *Ibid*

yang menjadikan Cirebon sebagai Kerajaan Islam yang merdeka dan otonom, tidak lagi berada di bawah kekuasaan Kerajaan Hindu Pajajaran.

## B. Perpecahan Kesultanan Cirebon

Kedudukan dan kharisma Cirebon pada masa Sunan Gunung Jati hingga Panembahan Ratu sangat dihormati oleh Banten dan Mataram. Keberadaan Kesultanan Cirebon dijadikan barometer Islamisasi di Jawa Barat sehingga Cirebon sangat dituakan oleh dua kesultanan tersebut. Kedudukan Kesultanan Cirebon juga disamakan dengan Kesultanan Demak yang merupakan Kerajaan Islam pertama di Jawa serta pusat islamisasi di Jawa Tengah.<sup>10</sup>

Meninggalnya Sunan Gunung Jati sebagai penguasa Cirebon ternyata membawa dampak tersendiri bagi eksistensi Cirebon sebagai Kerajaan Islam di Jawa Barat. Terlebih lagi ketika tahun 1677 pasca meninggalnya Panembahan Ratu II, Kesultanan Cirebon pecah menjadi beberapa kesultanan. Pecahnya kesultanan tersebut menjadikan Cirebon tidak menjadi satu kesatuan yang utuh lagi karena masing-masing pemimpin atau sultan ternyata berebut kedudukan serta menginginkan daerah kekuasaan.

### Latar Belakang Pecahnya Kesultanan Cirebon

#### 1. Campur Tangan Kesultanan Mataram

Cirebon merupakan tempat yang cukup strategis untuk jalur transportasi di Jawa serta memiliki pelabuhan yang besar. Adanya Kerajaan Islam juga ternyata membuat Cirebon semakin ramai pengunjung baik mereka yang ingin berdagang maupun belajar agama Islam. Wilayah kerajaan yang cukup luas dengan perekonomian yang maju membuat Cirebon banyak dilirik oleh negara atau kerajaan luar. Mereka berusaha untuk menanamkan pengaruhnya serta menguasai Cirebon, salah satunya adalah Kesultanan Mataram. Raja Mataram sudah lama ingin menguasai Cirebon. Salah satu cara adalah dengan pernikahan politis, yaitu pernikahan Sultan Agung Anyokrokusumo dengan putri Panembahan Ratu I selaku penguasa Cirebon, yang tidak diketahui namanya.<sup>11</sup> Melalui pernikahan inilah,

---

<sup>10</sup>Hasan Muarif Ambary, "Peranan Cirebon sebagai Pusat Perkembangan dan Penyebaran Islam" dalam Susanto Zuhdy dkk, *Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996), hlm. 39.

<sup>11</sup>Singgih Tri Sulistiyono, "Dari Lemahwungkuk Hingga Cheribon: Pasang Surut Perkembangan Kota Cirebon Sampai Awal Abad XX", dalam Susanto Zuhdi, *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996), hlm. 119-120

Mataram mencoba untuk menanamkan pengaruhnya di Cirebon sehingga dikemudian hari bisa menguasai wilayah Cirebon secara keseluruhan.

## 2. Campur Tangan Kesultanan Banten

Kesultanan Banten didirikan oleh seseorang Cirebon yaitu Sunan Gunung Jati. Pada awalnya Kesultanan Banten adalah wilayah kekuasaan dari kerajaan Cirebon, akan tetapi pasca meninggalnya Sunan Gunung Jati, Banten menjadi kesultanan yang merdeka dan berdaulat. Cirebon kehilangan satu wilayah yang cukup berpengaruh, karena Kesultanan Banten menjadi basis pertahanan yang cukup kuat bagi Cirebon di bagian barat.

Pergeseran sikap Sultan Maulana Yusuf terhadap Kesultanan Cirebon terlihat ketika Banten berhasil menghancurkan Kerajaan Pajajaran. Ada perkiraan juga bahwa Sultan Maulana Yusuf menganggap bahwa dirinya lebih senior karena keturunan langsung atau cucu dari Sunan Gunung Jati.<sup>12</sup> Anggapan itu masuk akal karena di Cirebon sendiri sejak meninggalnya Sunan Gunung Jati, sudah tidak ada lagi penerus langsung untuk menggantikan tahtanya.

Sultan Maulana Yusuf ingin menjadikan Banten sebagai negara super power menggantikan posisi Kesultanan Cirebon yang kini semakin melemah. Keberhasilan Banten dalam mengalahkan Kerajaan Pajajaran secara otomatis menjadikan Banten sebagai penguasa daerah-daerah bekas kekuasaan Kerajaan Pajajaran seperti Priangan dan Sumedang Larang.<sup>13</sup> Banten juga menganggap Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai bagian daerah kekuasaannya yang diperoleh dari kekalahan Pajajaran padahal pelabuhan tersebut sudah menjadi daerah kekuasaan Cirebon sejak tahun 1526.

Bagi Banten semua bekas daerah kekuasaan Pajajaran beserta pelabuhannya menjadi wilayah operasional pemerintahan Banten. Ketidakjelasan pembagian wilayah antara Cirebon dengan Banten tidak menjadikan kedua kesultanan ini berseteru dengan pertumpahan darah. Tidak ada dokumen resmi tentang pembagian wilayah ini, akan tetapi kedua kesultanan menetapkan sendiri-sendiri pembagian wilayah tersebut.<sup>14</sup> Kemungkinan besar Pelabuhan Sunda Kelapa dikuasai oleh Banten karena menurut Sultan Maulana Yusuf, Banten lah yang telah berjasa membebaskan Jawa Barat dari pengaruh Kerajaan Pajajaran.

---

<sup>12</sup>Unang sunardjo, op.cit., hlm. 107.

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>*Ibid*

Campur tangan Kesultanan Banten terhadap Cirebon mulai terasa ketika Panembahan Ratu II dan kedua putranya ditahan di Mataram. Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan pengganti Sultan Maulana Yusuf, berusaha keras untuk berkompetisi dengan Mataram untuk menguasai Cirebon. Pengangkatan Pangeran Wangsakerta sebagai Kepala Negara Cirebon selama Panembahan Ratu II dan kedua anaknya menjadi tahanan Mataram, mempunyai dampak tersendiri bagi Cirebon. Dengan dinobatkannya Pangeran Wangsakerta oleh Sultan Ageng menandakan adanya pengakuan dari masyarakat Cirebon bahwa Banten mempunyai kekuatan besar untuk melindungi Cirebon dari terkaman Mataram.<sup>15</sup>Cirebon mengakui Banten sebagai pelindung satu-satunya dan harus ditaati petunjuk-petunjuknya. Dengan artian bahwa Cirebon adalah daerah protektorat Kesultanan Banten.

### C. Dampak Perpecahan Kesultanan Cirebon terhadap Kehidupan Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Kesultanan Cirebon pernah mengalami masa-masa bahagia pada abad awal berdirinya dan dapat menciptakan suasana damai yang tumbuh menjadi negara makmur.<sup>16</sup>Sayangnya masa ini hanya terjadi pada pemerintahan Sunan Gunung Jati hingga Panembahan Ratu II.

Bibit kemunduran Kesultanan Cirebon berawal ketika kesultanan ini dibagi menjadi dua kesultanan yaitu Kasepuhan dan Kanoman pada tahun 1677.<sup>17</sup> Pecahnya Kesultanan terlepas dari Sultan Banten yaitu Sultan Ageng Tirtayasa yang memberikan gelar sultan kepada putra Panembahan Ratu II. Pecahnya Kesultanan Cirebon memicu adanya perselisihan antar sultan Cirebon untuk mendapatkan daerah kekuasaan. Melihat adanya konflik keluarga sultan-sultan Cirebon, VOC mencoba memanfaatkan keadaan tersebut. VOC melakukan intervensi terhadap kesultanan di Cirebon dengan dalih untuk meredakan konflik antar sultan serta menciptakan perdamaian. VOC berhasil menanamkan pengaruhnya yang berujung pada penguasaan wilayah Cirebon. Adanya pengaruh dan campur tangan VOC dalam tubuh kesultanan membuat perubahan dalam bidang politik dan ekonomi di Cirebon.

#### 1. Dampak dalam Bidang Politik

---

<sup>15</sup>*Ibid*

<sup>16</sup>R.A. Kern dan Hoesein Djajadiningrat, *Masa Awal Kesultanan Cirebon*. (Jakarta: Bhratara, 1974), hlm. 21

<sup>17</sup>Uka Tjandrasmita, *Arkeologi Islam Nusantara*. (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 167

Masa kejayaan Kesultanan Cirebon pada akhirnya lambat laun menjadi surut, apalagi dengan dikuasainya wilayah Cirebon oleh VOC. Hubungan ini berawal ketika Kesultanan Cirebon terbagi menjadi dua kesultanan dengan tiga penguasa dan masing-masing sultan merebutkan daerah kekuasaan. Sultan Sepuh I meminta bantuan VOC untuk menyelesaikan konflik tersebut dan meminta perlindungan kepadanya. Sultan Sepuh I menganggap bahwa sangat tepat jika meminta bantuan VOC karena VOC dianggap sudah membantu Cirebon untuk melawan serangan Banten pada tahu 1680. Pada saat itu Kesultanan Banten menyerang Cirebon dengan dipimpin oleh Pangeran Kidul ketika sultan-sultan Cirebon tidak ada ditempat. kini terpuruk bersama kekuasaannya.<sup>18</sup>

Pada isi perjanjian 7 Januari 1681, Cirebon resmi menjadi daerah protektorat VOC sehingga Sultan tidak lagi mendapatkan hak penuh dalam memimpin Cirebon. Sultan-sultan Cirebon hanya menjadi boneka VOC yang dimanfaatkan untuk kepentingan VOC semata. Sultan Cirebon tidak boleh memperkuat pertahanan baik di pedalaman maupun disepanjang pantai tanpa izin dari VOC.<sup>19</sup> Padahal sebagai kesultanan yang berdaulat, membangun daerah pertahanan sangatlah diperlukan. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga keamanan dari segala ancaman pihak luar yang ingin mematahkan kekuatan Cirebon.

Pembatasan akan wewenang sultan untuk memimpin Cirebon merupakan salah satu bukti bahwa para sultan mulai kehilangan kekuasaannya sebagai seorang pemimpin. Perjanjian 7 Januari 1681 ternyata tidak membawa konflik antar sultan tentang permasalahan pembagian wilayah kekuasaan mencapai kesepakatan. Perjanjian ini hanya menekankan bahwa Cirebon resmi menjadi bawahan VOC, sehingga semua urusan baik di dalam keraton maupun luar keraton diatur oleh VOC.

Sistem pemerintahan tetap dijalankan oleh sultan akan tetapi secara politik dan ekonomi VOC lah yang mengatur Cirebon. Kekuasaan sultan-sultan Cirebon menjadi

---

<sup>18</sup>Mayor William Thorn, *"The Conquest of Java – Nineteenth Century Java Seen the Eyes a Soldier of the British Empire"*, a.b., Noviatri, *Penaklukan Pulau Jawa – Pulau Jawa di Abad Sembilan Belas dari Amatan Serdadu Kerajaan Inggris*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 261.

<sup>19</sup>Singgih Tri Sulistiyono, *"Dari Lemahwungkuk Hingga Cheribon: Pasang Surut Perkembangan Kota Cirebon Sampai Awal Abad XX"*, dalam Susanto Zuhdi, *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), hlm. 121.

melemah, meskipun VOC masih mengakui akan kedudukan sultan. Gelar sultan hanya dijadikan simbol serta kepentingan VOC untuk menerapkan kebijakan politiknya di Cirebon dengan mengatasnamakan sultan. Tentunya hal ini dimaksudkan agar masyarakat Cirebon patuh dan setuju atas kebijakan tersebut.

Belum juga konflik antar sultan mereda, sekitar tahun 1685 terjadi lagi konflik antar sultan Cirebon, kali ini mengenai kedudukan sultan. Seperti perjanjian sebelumnya, VOC lah yang menjadi pihak penengah dalam konflik ini. Naskah perjanjian ditandatangani pada 4 Desember 1685 di Keraton Kasepuhan, dari pihak keraton diwakili oleh Sultan Sepuh I, Sultan Anom I dan Panembahan Cirebon, sedangkan pihak VOC diwakili oleh Francois Tack.<sup>20</sup> Masing-masing utusan sepakat dengan isi perjanjian meskipun perjanjian ini sama seperti perjanjian sebelumnya yaitu merugikan pihak Cirebon.

Perjanjian ini berisi pernyataan mengenai pemerintahan dan hal-hal yang harus dipatuhi oleh sultan-sultan Cirebon, bahwa VOC adalah penguasa Cirebon. Masalah pemerintahan di Cirebon akan dipimpin oleh masing-masing sultan seperti halnya dengan inti perjanjian sebelumnya.<sup>21</sup> Sultan-sultan Cirebon tetap menjalankan pemerintahan akan tetapi dibawah kekuasaan VOC. Sultan Cirebon juga tidak boleh membuat perintah sendiri-sendiri, melainkan harus melalui perundingan dengan mantri.<sup>22</sup> . Masing-masing sultan mempunyai mantri lebih dari satu, Sultan Sepuh mempunyai 3 mantri, Sultan Anom dan Panembahan Ratu masing-masing mempunyai 2 mantri. Semua mantri dipilih oleh VOC sehingga semua keputusan mantri harus sepengetahuan dari pihak VOC.

Letak dari loji sendiri berada di kawasan Pelabuhan Cirebon hingga bisa dikatakan bahwa VOC ingin menguasai Pelabuhan Cirebon dan mengontrol aktivitas perdagangan di Cirebon. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pelabuhan Cirebon merupakan pelabuhan internasional sehingga pusat perekonomian di Cirebon terpusat di pelabuhan. Perselisihan antar sultan Cirebon dijadikan pintu masuk bagi VOC untuk menanamkan pengaruhnya dan menguasai wilayah Cirebon. Perselisihan tersebut sering terjadi dan sebagai pihak mediator atau penengahnya adalah VOC. Perjanjian

---

<sup>20</sup>*Ibid*

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>22</sup>*Ibid*

persahabatan antara sultan dan VOC terjadi pada tanggal 7 Januari 1681 dilanjutkan lagi pada 4 Desember 1685, 5 Desember 1688, 4 Agustus 1699, 17 Januari 1708, 18 Januari 1752.<sup>23</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Cirebon memiliki letak yang strategis dan keberadaan Pelabuhan Cirebon yang ditengah-tengah pulau Jawa sehingga mempermudah jalur perdagangan ke beberapa daerah lokal maupun mancanegara. Cirebon juga sangat strategis dijadikan basik pertahanan bagi Mataram dari serangan musuh yang datang dari barat.

Pembagian kedudukan sultan tertulis pada pasal pertama, yaitu hanya Sultan Sepuh yang berhak bersabda dan memberi perintah di alun-alun, bila Sultan Sepuh berhalangan, hak bersabda dan memberi komando berpindah ke tangan Sultan Anom. Bila keduanya berhalangan, Panembahan Cirebon harus mengambilalih tugas tersebut. Bila ketiganya tidak dapat hadir, tugas dapat diambilalih oleh putera tertua dari Sultan Sepuh dan Sultan Anom. Bila mereka juga tidak hadir, Pangeran Ratu dari Pangeran Anom berhak mengambilalih tugas tersebut.<sup>24</sup>

Pada akhirnya sultan-sultan Cirebon kehilangan kekuasaan politiknya karena ketika perjanjian 18 Januari 1752 VOC mengeluarkan peraturan mengenai pergantian sultan. Secara garis besar perjanjian tersebut mencakup dua hal, pertama pergantian tahta kesultanan harus berdasarkan warisan dari ayah kepada anak. Kedua, apabila sultan meninggal dan tidak mempunyai keturunan langsung maka kekayaan dan peranan dalam pemerintahan harus dibagi kepada sultan-sultan yang lain.<sup>25</sup> Seperti halnya ketika Panembahan Cirebon wafat pada tahun 1773 tanpa meninggalkan seorang putra, maka VOC membagi kekayaan dan daerah kekuasaan Panembahan Cirebon untuk Kasepuhan dan Kanoman.

Peraturan VOC menyangkut juga tentang gelar sultan, yaitu gelar sultan hanya diberikan kepada dua penguasa saja, pemimpin kesultanan selanjutnya hanya boleh menggunakan gelar pangeran.<sup>26</sup> Setiap pergantian sultan, harus berdasarkan persetujuan

---

<sup>23</sup> Uka Tjandrasasmita, loc.cit

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD, op.cit., hlm 246.

<sup>26</sup> Sobana Hardjasaputra, op.cit., hlm. 121.

dari VOC. Misalnya ketika Sultan Anom IV meninggal seharusnya tahta digantikan oleh putra pertamanya yaitu Pangeran Surianagara, akan tetapi VOC justru mengangkat adik seayahnya yaitu Pangeran Surantaka. VOC bahkan mengusir Pangeran Suruanagara, Pangeran Lautan dan Pangeran Kabupaten keluar dari keraton. VOC benar-benar merampas kekuasaan politik sultan serta menggugurkan hak putra mahkota sebagai pewaris tahta.<sup>27</sup>

Semua keputusan yang ditandatangani oleh sultan harus atas perintah dan persetujuan dari VOC. Sultan kehilangan kekuasaan politiknya hingga akhirnya gelar sultan hanya sebatas simbol karena yang menjalankan pemerintahan adalah VOC. Seperti halnya pada pasal 22 dalam perjanjian 8 September 1688 disebutkan bahwa, “Titel sultan dan panembahan digunakan dalam surat dan naskah dari Kompeni. Diluar itu disebut raja atau pangeran Cirebon dan nama asli Martawijaya, Kartawijaya dan Wangsakerta”.<sup>28</sup>

Pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dinyatakan bangkrut karena maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC sendiri. Hingga akhirnya VOC benar-benar bubar dan kekuasaan di Nusantara diambil alih oleh Koninkrij Holland (Pemerintah Kerajaan Belanda) dan Nusantara disebut Hindia Belanda.<sup>29</sup> Lodewijk Napoleon selaku raja di Belanda mengutus Herman Willem Deandels untuk menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda pada tanggal 18 Januari 1807. Deandels menerapkan sistem sentralistik dalam pemerintahannya, yaitu memerintah rakyat secara langsung tanpa perantara bupati atau sultan. Deandels menurunkan kedudukan bupati dan sultan yaitu sebagai pegawai tinggi pemerintah kolonial dan mendapatkan gaji, dengan artian bahwa Deandels mensejajarkan kedudukan bupati dengan sultan. Status sultan tidak berlaku lagi karena penguasa Cirebon adalah Deandels.

Tanggal 2 Februari 1809, berdasarkan Reglement op het Beheer van Cheribonsche Landen (Peraturan tentang penguasaan atau pemerintah daerah Cirebon), wilayah pemerintahan Cirebon ditetapkan sebagai prefektur atau identik dengan

---

<sup>27</sup>*Ibid*

<sup>28</sup>Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD, op.cit., hlm 252.

<sup>29</sup>*Ibid*

keresidenan.<sup>30</sup> Adanya keputusan ini, sultan-sultan Cirebon secara politis menjadi pegawai pemerintahan Kolonial Belanda dan tidak lagi memiliki kekuasaan politik untuk memimpin Cirebon. Kepala pemerintahan diganti oleh Bupati yang diangkat langsung oleh Gubernur Jenderal.

## 2. Dampak dalam Bidang Ekonomi

Keadaan ekonomi Cirebon pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati hingga Panembahan Ratu II mengalami kemajuan yang signifikan. Khususnya pada masa Sunan Gunung Jati, ketika memperluas Pelabuhan Muara Jati perdagangan di Cirebon tidak hanya sebatas antar penduduk lokal melainkan perdagangan internasional, terutama adalah Tiongkok. Kemajuan ekonomi Cirebon dilatarbelakangi oleh terpenuhinya sarana perdagangan yaitu Pelabuhan Muara Jati dan transportasi yang memadai.<sup>31</sup> Transportasi yang dimaksud adalah perahu-perahu kecil yang berlayar dari sungai daerah pedalaman menuju pelabuhan.

Sepeninggal Sunan Gunung Jati merupakan awal menyurutnya perekonomian Cirebon terlebih lagi dengan lepasnya Banten dari wilayah kekuasaan Cirebon. Lepasnya Kesultanan Banten membawa dampak yang merugikan bagi Cirebon, karena Banten mempunyai pelabuhan yang besar dan cukup ramai dalam jalur perdagangan lokal ataupun internasional. Sebagai jalur perdagangan yang cukup strategis, Banten menjadi wilayah maju dan mempunyai perekonomian yang berkembang pesat.

Selain itu, Banten juga dijadikan sebagai basis pertahanan bagian barat bagi Kesultanan Cirebon sehingga dengan lepasnya Banten, angkatan pertahanan Cirebon sedikit melemah. Ketika Kesultanan Cirebon pecah menjadi dua kesultanan dan VOC mulai menguasai Cirebon, pada saat itulah perekonomian Cirebon dimonopoli oleh VOC.

Hubungan antara Cirebon dengan VOC pada awalnya hanya sebatas hubungan dagang. Sejak VOC berdiri tahun 1602, kemudian mendirikan kantor dagang yang berfungsi sebagai benteng di Banten serta pada tahun 1601 mendirikan di Jayakarta, tahun 1613 di Jepara, VOC juga sering datang ke Pelabuhan Cirebon untuk bongkar muat

---

<sup>30</sup>Istilah keresidenan digunakan dalam konteks pemerintahan Gubernur Jenderal Deandels untuk memudahkan penyebutan, sebagai pengganti prefect. Sebenarnya istilah keresidenan mulai digunakan pada zaman pemerintahan Letnan Gubernur Jenderal Raffles. Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD, op.cit., hlm. 135.

<sup>31</sup>Dadan Wildan, *Sunan Gunung Jati*. (Ciputat: Salima, 2012), hlm. 253

barang.<sup>32</sup> Pihak VOC kadangkala meminta bantuan raja Cirebon apabila mendapat kendala dalam perdagangan di laut. Perjanjian persahabatan antara sultan-sultan Cirebon dengan VOC tidak hanya mempengaruhi kehidupan politik Cirebon akan tetapi pada bidang ekonomipun Cirebon mengalami perubahan.

Isi perjanjian 7 Januari 1681 yang dapat mempengaruhi perekonomian Cirebon, antara lain: 1) Barang-barang dagangan milik Kompeni yang masuk ke Cirebon bebas dari cukai 2) Kompeni memiliki hak monopoli pembelian beras, lada, kayu, gula, kapas, dan lain-lain, serta bebas dari pajak impor-ekspor 3) Pedagang pribumi harus mendapat izin dari VOC dan jumlahnya dibatasi.<sup>33</sup> Isi perjanjian 7 Januari 1681 ini sangat mempengaruhi perjalanan Cirebon sebagai kota dagang. Kompeni akhirnya mendapatkan hak monopoli impor pakaian, kapas dan opium serta monopoli ekspor berupa lada, gula, kayu, beras dan produk yang dikendaki VOC.<sup>34</sup> Dengan adanya perjanjian inilah VOC bebas dari bea impor yang sebelumnya dikenakan 2% dari nilai barang. VOC dengan kuasanya melakukan transaksi ekspor dan impor barang tanpa seizin dari sultan Cirebon.

### 3. Dampak dalam Bidang Sosial

Pecahnya Kesultanan Cirebon berpengaruh dalam bidang sosial yaitu adanya perubahan status sosial masyarakat Cirebon dan konflik sosial yang ada di dalam keluarga keraton. Selain itu bisa juga dilihat dari perilaku sosial masyarakat Cirebon yang mayoritas muslim, banyak menyimpang dari norma-norma agama Islam. Perubahan sosial pada masyarakat Cirebon tentunya terjadi akibat adanya pemerintah VOC yang ikut campur pada pemerintahan sultan-sultan Cirebon sehingga kebijakan VOC sangat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat itu sendiri.

Stratifikasi atau status sosial masyarakat Cirebon terdiri dari tiga golongan. Pertama adalah golongan bangsawan tingkat atas, terdiri atas raja atau sultan beserta keluarga dan pejabat tinggi kerajaan. Kedua adalah golongan bangsawan tingkat menengah, terdiri atas pegawai kerajaan tingkat menengah seperti para ksatria, demang,

---

<sup>32</sup>Sobana Hardjasaputra, dkk., op.cit., hlm. 102.

<sup>33</sup>ANRI, *Verdrag ofte Overeenkoms*, 7 Januari 1681.

<sup>34</sup>Singgih Tri Sulistiyono, "Dari Lemahwungkuk Hingga Cheribon: Pasang Surut Perkembangan Kota Cirebon Sampai Awal Abad XX", dalam Susanto Zuhdi, *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), hlm. 121

tokoh agama, saudagar, dan bangsawan yang tingkat statusnya menengah.<sup>35</sup> Ketiga adalah golongan rakyat biasa yang berasal dari keluarga petani, nelayan dan pedagang kecil.

Golongan bangsawan tingkat atas sudah jelas adalah mereka yang berasal dari keluarga keraton dan pejabat tinggi keraton. Golongan ini tinggal di dalam kompleks keraton. Golongan kedua menempati pemukiman khusus, mereka tidaklah tinggal di dalam kompleks keraton melainkan tinggal di pemukiman khusus yaitu di Ksatrian dan Kademangan. Golongan ketiga adalah mereka rakyat kecil yang mendiami wilayah Cirebon baik di pesisir pelabuhan maupun di pedesaan. Mereka adalah rakyat biasa yang menetap dan bekerja di Cirebon.

Ketika VOC berhasil menguasai wilayah Cirebon, pejabat VOC dari Belanda menempati golongan pertama sejajar dengan sultan dankeluarganya. Pejabat VOC seakan merasa lebih tinggi status sosialnya dibandingkan sultan dan keluarganya. Hal ini dikarenakan VOC yang sudah menguasai Cirebon membuat status sultan-sultan Cirebon menjadi melemah. Hak istimewa sultan seolah-olah hilang karena VOC ikut campur dalam urusan pemerintahan di kesultanan.<sup>36</sup> Hak istimewa sultan adalah kedudukan sultan Cirebon yang menjadi penguasa tunggal dan sangat dihormati oleh rakyatnya.

Ketika kedudukannya tergeser oleh VOC, saat inilah sultan kehilangan kekuasaannya di Cirebon. Kelas-kelas sosial dalam dunia pekerjaan sangat terasa sekali di Cirebon, yaitu terbentuknya kelas kuli biasa, pekerja berpengalaman dan mandor. Gaji yang mereka dapatkan tergantung dari setiap perusahaan dimana mereka bekerja dan juga besarnya tergantung pada kelas-kelas tersebut. Akan tetapi keistimewaan tidak berpihak pada masyarakat pribumi karena meskipun sesama kuli biasa gajinya akan lebih rendah dari kuli biasa yang berasal dari orang Cina, begitupun dengan pekerja berpengalaman maupun mandor.

Gaji yang orang pribumi dapatkan akan lebih rendah dari orang Cina meskipun mereka berasal dari kelas yang sama. Diskriminasi terhadap rakyat pribumi membuat status mereka menjadi sangat rendah. Selain itu, kemiskinan dan pemerasan lewat pajak

---

<sup>35</sup>Sobana Hardjasaputra dkk., *Cirebon dalam Lima Zaman (Abad ke-15 hingga Pertengahan Abad ke-20)*. (Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2011), hlm. 78-79.

<sup>36</sup>*Ibid*

dan cara lain yang membuat rakyat sengsara, menimbulkan suatu kejahatan sosial ialah perbudakan manusia atau menjual diri dan keluarga kedalam perbudakan.<sup>37</sup>

Tidak hanya perbudakan dan penjualan diri saja yang marak di Cirebon. Dengan adanya pabrik arak di Cirebon yang dikelola oleh orang Cina memicu adanya perilaku menyimpang dari ajaran agama Islam. Masyarakat Cirebon mempunyai kebiasaan minum-minuman keras, kebiasaan ini terutama diserap oleh pegawai dan buruh pelabuhan. Hal ini dikarenakan orang-orang pelabuhan terbiasa dan terbuka dengan para pendatang sehingga buruh pelabuhan dengan mudah beradaptasi dengan para pendatang, salah satunya adalah orang-orang Cina yang memang cukup banyak singgah di Cirebon.

Perilaku menyimpang lainnya adalah perjudian baik di kawasan pelabuhan maupun pedalaman. Perjudian dan kebiasaan minum-minuman keras memang sudah terjadi jauh-jauh hari sebelum VOC menguasai Cirebon, akan tetapi ketika Cirebon dijadikan pusat penyebaran agama Islam oleh Sunan Gunung Jati, kebiasaan ini sudah berkurang drastis. Maraknya perilaku menyimpang dari ajaran agama Islam ini mulai berkembang lagi ketika para pejabat VOC masuk ke Cirebon dan berhasil menguasai wilayah Cirebon. Mereka membawa kebiasaan ini dari negara asalnya dan menerapkannya di Cirebon. Kebiasaan judi dan mabukmabukan mengakibatkan angka kriminalitas di Cirebon cukup tinggi.

#### 4. Dampak dalam Bidang Budaya

Cirebon yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan mempunyai keraton bercorak Islam pula, ternyata mengalami perubahan budaya ketika VOC masuk dan berhasil menguasai. Budaya adalah cipta, karsa dan rasa oleh manusia. Budaya tercipta karena adanya aktivitas manusia sehingga menciptakan kebudayaan yang khas disetiap wilayahnya.

Dalam menganalisis perubahan budaya masyarakat Cirebon, peneliti akan menghubungkan dengan beberapa unsur kebudayaan menurut Koentjaraningrat. Kebudayaan mempunyai tujuh unsur yaitu, bahasa, sistem pengetahuan, organisasi

---

<sup>37</sup>Singgih Tri Sulistiyono, "Dari Lemahwungkuk Hingga Cheribon: Pasang Surut Perkembangan Kota Cirebon Sampai Awal Abad XX, dalam Susanto Zuhdi, Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah. (Jakarta: Departemen dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1996), hlm. 136.

politik, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi dan kesenian.

Misalnya saja dalam segi sistem mata pencaharian, masyarakat Cirebon yang pada awalnya mayoritas adalah para nelayan karena memang Pelabuhan Cirebon merupakan pelabuhan yang cukup besar dan ramai. Kegiatan utama masyarakat adalah menangkap udang untuk dijadikan terasi dan petis, ikan dan membuat garam. Ketika VOC berkuasa di Cirebon sebagian masyarakat Cirebon beralih menjadi petani karena VOC menerapkan tanam paksa agar masyarakat bisa menanam hasil pertanian yang VOC inginkan untuk dijual di pasar. Perubahan mata pencaharian masyarakat Cirebon terbilang dipaksakan karena untuk memenuhi pasar internasional, VOC lebih menekankan pada perdagangan rempah-rempah dibandingkan dengan hasil laut.

Organisasi politik di Cirebon pun mengalami perubahan. Sebelum Cirebon terbagi menjadi beberapa kesultanan, struktur pemerintahan terdiri dari raja sebagai penguasa tertinggi dan dibantu oleh para ulama dan petinggi kerajaan yang mempunyai tugas pokok dalam menjalankan sistem pemerintahan. Petinggi kerajaan biasanya adalah keluarga dari sultan dan masih mempunyai garis keturunan dari keluarga sultan.

Struktur pemerintahan mulai mengalami perubahan ketika VOC berhasil menguasai Cirebon. Posisi raja atau sultan berada di titik lemah karena VOC membentuk mantri untuk mengawasi segala aktivitas di dalam keraton. Kedudukan sultan disejajarkan dengan pejabat VOC dan secara prakteknya pejabat VOC lah yang lebih tinggi jabatannya. Segala keputusan sultan harus seizin dari VOC dan segala keinginan dan peraturan VOC harus ditaati oleh sultan dan semua masyarakat Cirebon. Melalui keberadaan mantri dari masing-masing sultan, VOC dengan mudah mengontrol dan mengawasi sultan karena para mantri diangkat oleh VOC untuk membantu sultan sekaligus mengawasi sultan agar para sultan tidak membuat perintah dengan kehendak sendiri.

Dalam segi sistem peralatan hidup dan teknologi sudah tentu mengalami perubahan. Cirebon yang terkenal sebagai kota yang jorok sehingga melahirkan wabah penyakit, sejalan dengan kepentingan VOC maka dibuat saluran air, penghilang genangan

air limbah dan air hujan, pembuangan sampah dan kotoran, dan pembuatan kakus dan pemandian umum.<sup>38</sup>

Dalam bidang religi, kegiatan dakwah agama Islam mengalami penurunan karena VOC melakukan pengawasan terhadap para pemuka agama di Cirebon. Kompeni membuat peraturan untuk mewajibkan penguasa pribumi untuk mengawasi kegiatan keagamaan, terutama yang dilakukan oleh para kiyai atau pemuka agama.<sup>39</sup> Peraturan VOC ini membuat segala aktivitas keagamaan di Cirebon tidak berjalan dengan baik. Para kiyai mendapat tekanan dari pejabat-pejabat VOC sehingga mereka sedikit terkendala dalam melakukan dakwahnya. Bisa dikatakan bahwa pada saat Cirebon mulai dikuasai oleh VOC, para kiyai mulai merasa kesulitan untuk menyebarkan agama Islam ke daerah-daerah pedalaman.

Kesenian Cirebon juga mengalami perubahan misalnya saja dengan hasil kebudayaan Cirebon yang terkenal yaitu batik. Motif megamendung merupakan motif khas Cirebon dengan corak berbentuk awan dan degradasi warna yang sangat menarik. Sejak VOC menguasai Cirebon, perkembangan motif batik semakin beragam. Masyarakat Cirebon tidak hanya membuat batik dengan motif megamendung dan batik motif Cina saja, melainkan mulai merambah pada motif kompeni. Motif kompeni menggambarkan kehidupan masyarakat Cirebon dibawah kekuasaan VOC. Adapun ciri motif kompeni adalah biasanya tentang kehidupan tentara kompeni jaman dulu dengan ciri khas membawa bedil atau senapan, ada juga tentang kehidupan petani dan pedagang.

## KESIMPULAN

### 1. Sejarah Masa Awal Kesultanan Cirebon

Cirebon pada awalnya merupakan bagian dari daerah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Perubahan status Cirebon dimulai ketika Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di Jawa Barat dan menjadi pemimpin di Cirebon. Sunan Gunung Jati sebagai seorang pemuka agama Islam dengan tegas memutuskan hubungan dengan Kerajaan Pajajaran yang masih menganut agama Hindu. Pada 12 Safar 887 Hijriah atau 2 April 1482, Cirebon pada akhirnya

---

<sup>38</sup>Singgih Tri Sulistiyono, *op.cit.*, hlm. 139

<sup>39</sup>O 2 Sobana Hardjasaputra dkk., *op.cit.*, hlm. 122

*Batutah: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*  
Volume 1, Nomor 1, 2022

menjadi Kerajaan Islam yang berdaulat penuh karena Sunan Gunung Jati menghentikan pemberian upeti kepada Kerajaan Pajajaran. Langkah ini merupakan awal dari perjalanan panjang Cirebon sebagai Kerajaan Islam yang berdaulat. Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, bisa dikatakan bahwa Cirebon berada di puncak kejayaan.

## 2. Perpecahan Kesultanan Cirebon

Pasca meninggalnya Panembahan Ratu II, pada tahun 1677 Cirebon terpecah menjadi dua kesultanan yaitu Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman. Terbaginya Cirebon menjadi dua kesultanan pada tahun 1677 membuat posisi Cirebon menjadi lemah. Kondisi ini menimbulkan konflik saudara yaitu para sultan yang saling merebutkan kedudukan dan daerah kekuasaan. Konflik yang berkelanjutan akhirnya dimanfaatkan oleh VOC untuk mempengaruhi dan menguasai wilayah Cirebon dengan menawarkan bantuan untuk menjadi penengah dengan melakukan perjanjian.

## 3. Dampak Perpecahan Kesultanan Cirebon terhadap Kehidupan Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Perjanjian yang telah disepakati oleh pihak sultan membuat VOC semakin kuat berpengaruh di Cirebon. Dalam bidang politik salah satunya adalah hilangnya kekuasaan sultan sebagai seorang pemimpin. Pemerintahan masih dijalankan oleh sultan akan tetapi VOC lah yang mengatur dan memberi keputusan. Pada perkembangan selanjutnya, gelar sultan hanya sebatas simbol untuk kepentingan surat menyurat dan naskah dari VOC, diluar itu sultan hanya disebut pangeran dan nama aslinya.

Melalui perjanjian persahabatan, VOC juga dengan mudah menguasai perekonomian Cirebon. VOC mendapatkan hak monopoli impor dan ekspor antara lain pakaian, kapas, opium, lada, gula, kayu, beras dan produk lainnya yang tentunya dikehendaki oleh VOC. Untuk memenuhi pasar internasional, VOC melakukan tanam paksa untuk komoditi yang dikehendaki oleh VOC.

Dalam bidang sosial, terjadi perubahan status sosial para sultan. Pejabat VOC menempati posisi teratas dan sejajar dengan sultan dan keluarganya. Akan tetapi dalam prakteknya pejabat VOC ternyata merasa lebih tinggi status sosialnya dibandingkan para sultan. Selain itu terjadi diskriminasi terhadap masyarakat Cirebon dengan dibaginya kelas sosial dalam urusan pekerjaan.

Dalam bidang budaya terjadi perubahan dalam sistem mata pencaharian, organisasi politik, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem religi dan kesenian. Perubahan sistem mata pencaharian yang semula penduduk mayoritas sebagai nelayan berubah menjadi petani. Dalam segi sistem peralatan hidup dan teknologi masyarakat dikenalkan dengan pembuatan saluran air dan tempat pembuangan sampah dan kotoran sehingga tidak jorok lagi seperti dulu. VOC membatasi kegiatan keagamaan sehingga penyebaran agama Islam oleh kiyai Cirebon terkendala.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adeng, dkk. (1998). *Kota Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ahmad Hamam Rochmani. (2010). *Baluarti Keraton Kasepuhan Cirebon*. Cirebon: Keraton Kasepuhan.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif. (2015). *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Historis*. Bandung: Mizan.
- Baggelaar, J.J. "De Haven van Cheribon". Dalam Molsbergen, E.C. Godee. (1931). *Gedenkboek der Gemeente Cheribon 1906-1931*. Cheribon:De Staggemeente Cheribon.
- Balk, G.L., dkk. (2007). *The Archives of the Dutch East India Company and the Local Institutions in Batavia*. Leiden: Boston.
- Dadan Wildan. (2012). *Sunan Gunung Jati*. Ciputat: Salima.
- Dadang Supardan. (2011). *Pengantar Ilmu Sosial (Sebuah Kajian Pendekatan Struktural)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Daliman. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak. Gottschalk, Louis. "Understanding History: a Primer of Historical Method". a.b.
- Nugroho Notosusanto. *Mengerti Sejarah*. (2008). Jakarta: UI Press.
- Hasan Muarif Ambary. "Peranan Cirebon sebagai Pusat Perkembangan dan Penyebaran Islam". Dalam Susanto Zuhdy. (1996). *Cirebon sebagai Bandar jalur Sutra*. Jakarta:Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

- Helius Sjamsuddin. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Kemp, P.H. Van Der. “*De Cheribonshe Onlusten Van 1818 Naar Oorsprokenkelijke Stukken*”.
- a.b Panjaitan. (1979). *Pemberontakan Cirebon Tahun 1818*. Jakarta: YayasanIdayu.
- Kern, R.A. dan Hoesein Djajadiningrat. (1974). *Masa Awal Kerajaan Cirebon*. Jakarta: Bhratara.
- Kosoh, dkk. (1994). *Sejarah Daerah Jawa Barat*. Jakarta: DepartemenPendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat sejarah dan Nilai Tradisional.
- Koentjaraningrat. (tanpa tahun). *Pengantar IlmuAntropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Lapian dan Edi Sedyawati. “*Kajian Cirebon dan Kajian Jalur Sutra*”. Dalam Susanto Zuhdi. (1996). *Cirebon Sebagai Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia III Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.